

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan menurut UU No. 6 Tahun 2014 diarahkan mampu melayani dan mengayomi masyarakat, mampu menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat, dalam pembangunan. Hal ini pemerintah harus mampu mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan di desa atau tingkat kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di desa atau tingkat kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Peran aktif dari pemerintah sebagai penyedia dana pembangunan tidak dalam porsi keseluruhan karena perannya sebagai penyedia terbatas, dalam hal ini pemerintah hanya memberikan stimulus yang bersifat rangsangan untuk memancing swadaya masyarakat. Pendekatan dan prinsip-prinsip pembangunan desa adalah menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi juga dinamis serta berkelanjutan dengan memperhatikan adanya keseimbangan kewajiban yang serasi antara kegiatan pemerintah dengan kegiatan masyarakat.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan maka segenap potensi alam harus di gali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Kepala desa merupakan penyelenggara dan sekaligus penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan didalam wilayahnya. Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan dibidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan kuat bagi desa dimana desa tidak lagi sebagai bawahan daerah tetapi sebaliknya desa dan masyarakatnya berhak atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembanguana Infrastruktur desa. Desa sebagai unit pemerintah terkecil di dalam kecamatan dalam prakteknya berhubungan langsung dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam satu masyarakat biasanya diarahkan pada pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan kolektif masyarakat yang bersangkutan, baik peningkatan kapasitas akibat proses pemberdayaan masyarakat sendiri maupun hasil material atau kesejahteraan fisik” (Soetomo 2010:56)

Dalam meningkatkan efektivitasnya, pemerintah idealnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan, sehingga akhirnya dapat memberdayakan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menjalankan program pembinaan masyarakat desa sebagai proses yang berlangsung di desa dan tak terpisah dari pembangunan nasional.

Peran kepala desa sangat penting dalam keberhasilan suatu daerah, dalam pembangunan di wilayahnya, kepala desa merupakan perencana, pengawas, pelopor dan dinamisator. Peran kepala desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan, menumbuhkan serta mengembangkan swadaya pembangunan yang maksimal bagi infrastruktur desa. Kepemimpinan seorang Kepala Desa di setiap desa mesti mampu menjadi contoh atau teladan yang baik bagi masyarakatnya. Bila di desa mampu melahirkan pemimpin yang bagus dalam melangsungkan pembangunan, maka desa itu akan berubah ke arah yang lebih baik.

Karena itu, kepala desa selaku pejabat pemerintah idealnya selalu dapat menampilkan sikap dan perilaku yang mencerminkan citra kepemimpinan, baik dalam pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, dengan prinsip utama memberdayakan masyarakat itu sendiri, bukan menegakkan kekuasaan pemerintahan yang bersifat represif otoritarian. Dengan prinsip itu, dominasi peran birokrasi dapat mengalami pergeseran, diganti dengan menguatnya peran institusi masyarakat lokal atau adat. Hal ini didasarkan pada paham bahwa pemilik otonomi daerah bukan pemerintah, yang menikmati kekuasaan, kewenangan dan kekayaan, melainkan masyarakat lokal. Dari penjelasan di atas, bahwa pemerintahan desa adalah sebuah lembaga yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa di era

otonomi daerah. Responsivitas dan akuntabilitas pelayanan publik menjadi agenda yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pejabat pada tingkat ini, selain dalam upaya menjalankan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan pentingnya masyarakat mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien. Harus terjadi kesesuaian antara kepentingan aparat sebagai penyedia pelayanan publik dan aspirasi masyarakat, tanpa tercampuri kepentingan, sikap dan perilaku diskriminatif pejabat itu sendiri. Implikasinya adalah jika masyarakat merasa nyaman dan tenang dalam berurusan dengan penyedia pelayanan dan berpartisipasi dalam pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, maka kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di desa ini secara keseluruhan akan menjadi baik dan memuaskan.

Kepala Desa Raniate selaku pemimpin desa dalam menangani pembangunan desa jika diperhatikan dan didengar melalui perkataan sementara oleh masyarakat tanggap dengan kondisi desa, misalnya melalui penelitian awal peneliti mendengar bahwa ada beberapa tindakan dari kepala desa dalam memperhatikan bahkan sampai memperbaiki kondisi rumah masyarakat yang tidak layak pakai bahkan kepala desa juga beberapa kali mendata rumah yang tidak memiliki kamar mandi dirumah warga yang masih bisa dijangkau perhatannya melalui pegawai desa yang diutus. Diantara beberapa desa yang ada dikecamatan Pangururan desa Raniate termasuk desa yang paling luas, desa yang dihuni sekitar 1600 jiwa ( $\pm$  665 KK). Menurut keterangan beberapa warga dikarenakan kondisi pemukiman didesa Raniate memiliki titik kelompok rumah atau lebih dikenal susunan perumahan warga yang tidak merata misalkan pada titik A ditemukan ada sekitar 20 rumah kira-kira sekitar kurang lebih 150 meter, kondisi wilayah desa

Raniate dengan kondisi pemukiman yang menyebar dikarenakan kondisi ketinggian tanah tidak merata sehingga masyarakat berinisiatif mendirikan rumah dibagian-bagian yang cukup rata yang bisa dianggap dapat dibangun beberapa rumah pada tanah itu ( Desa Raniate, 22 Januari 2017)

Dalam hal ini pada intinya pembahasan ini ingin mengetahui peran kepemimpinan kepala desa Raniate terhadap masyarakat pada pembangunan infrastruktur desa. Indikator dari pada pembangunan infrastruktur desa yang akan dikaitkan kepada kepemimpinan kepala desa diantaranya adalah prasarana perhubungan yaitu jalan, baik jalan gang-gang maupun menuju kota atau kecamatan dan prasarana sosial/budaya misalnya gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, klinik kesehatan, puskesmas/rumah sakit serta balai desa. Desa Raniate merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pangururan yang berada di daerah Kabupaten Samosir, di desa ini lebih dominan masyarakat yang bersuku batak toba, kondisinya desa ini sesuai dengan penelitian awal masih belum merata dalam pembangunan terlebih dalam pembangunan jalan-jalan di setiap jalur perumahan masyarakat kondisinya jalan-jalan masih beralaskan bebatuan sehingga pengendara akan merasa tidak nyaman jika melintasi jalan tersebut.

Namun, kondisi jalan yang tidak merata pembangunnya karena desa yang cukup luas sehingga menurut pendapat sementara dana yang tidak memadai.

Menurut keterangan warga (Bp. Briono Sitanggang, 10 Januari 2018, 08.00 WIB) sejauh ini yang lebih terlibat dalam pembangunan desa adalah perangkat/pegawai desa, masyarakat sendiri hanya terlibat dalam kegiatan gotong royong yang selama ini dikerjakan hanya sekali setahun hanya karena kondisi tertentu saja misalkan ada pihak dinas yang ingin berkunjung kedesa itu, dan

bahkan warga sendiri bentuk partisipasi hanya bersama-sama memperbaiki titik jalan tertentu yang dianggap tidak baik dan kegiatan seperti itu hanya diadakan jika kondisi mendesak.

Dalam hal ini penulis sebagai peneliti di Desa Raniate, Kec. Pangururan, Kab. Samosir tertarik melakukan penelitian di lokasi tersebut karena sesuai keterangan awal perhatian kepala desa sudah dianggap cukup baik hanya saja dalam hal melibatkan warga untuk turut campur tangan dalam pembangunan desa masih kurang sesuai keadaan yang sudah terjadi dimana kegiatan gotong royong hanya sekali setahun sehingga, peneliti tertarik meneliti di lokasi tersebut untuk mengetahui apa penyebabnya. Perubahan kepemimpinan dari pada kepala desa saat ini dengan kepala desa sebelumnya dianggap sedikit berbeda karena kepala desa yang menjabat saat ini sudah memberikan perhatian kondisi rumah warga. selain itu juga peneliti tertarik meneliti di lokasi ini dikarenakan situasi dan keadaan masyarakat yang secara mayoritas adalah pekerja pertanian yang secara sepenuhnya waktu diluangkan untuk bekerja sehingga dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana masyarakat itu sendiri membagi peran dalam membantu pembangunan desa tersebut.

## **1.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam arti kata lain sebenarnya menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Dengan kata lain, upaya merumuskan pengertian dan menegaskan batasan dengan dukungan data hasil penelitian pendahuluan. Batasan masalah dapat pula dipahami sebagai batasan pengertian masalah, yaitu penegasan secara operasional (defenisi operasional) masalah tersebut yang akan memudahkan untuk melakukan penelitian (pengumpulan data).

peneliti membatasi suatu masalah yang hendak diteliti diantaranya yaitu pembangunan desa yang ada di Raniate (tentang kondisi fisik desa), dalam pembangunan infrastruktur desa peran kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat di desa, dan strategi dari kepala desa untuk mempengaruhi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa.

### 1.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kondisi pembangunan Infrastruktur di Desa Raniate, Kec.Pangururan, Kab. Samosir?
- b. Bagaimana peran dan strategi kepemimpinan kepala Desa dalam partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur desa?
- c. Bagaimana keterlibatan masyarakat di Desa Raniate dalam pembangunan infrastruktur desa?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu adanya tujuan yang hendak dicapai dan diharapkan, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah antara lain untuk:

- a. Untuk mengetahui kondisi ataupun keadaan pembangunan yang terjadi di desa Raniate, Kec. Pangururan, Kab.Samosir.
- b. Untuk mengetahui peran dan strategi kepemimpinan kepala desa dalam partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur desa.
- c. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Raniate.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik, khususnya ilmu terkait dengan kepemimpinan kepala desa didalam pembangunan infrastruktur desa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan kepada pemimpin desa mengambil peran dalam pembangunan infrastruktur desa, serta pelaksanaan strategi yang lebih efektif untuk menggerakkan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur desa.
- b. Memberikan pemahaman yang dianggap tepat kepada masyarakat agar memahami peran ataupun partisipasi masyarakat sangat perlu guna terlaksananya pemabangunan yang lebih baik.
- c. Memberikan pemahaman yang tepat bagi masyarakat ataupun pemimpin desa bahwa kerjasama dalam mewujudkan pembangunan desa sangat diperlukan.
- d. Penulis mendapat wawasan dan mengetahui baik secara data maupun hasil penelitian langsung kepada masyarakat mengenai strategi yang dilakukan dan peran kepemimpinan kepala desa terhadap masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.
- e. Penulis mengetahui kondisi secara langsung bagaimana pembangunan desa yang terjadi didesa Raniate, dan peran dari pada perangkat desa serta masyarakat yang ada didesa Raniate.